

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang kaya, terdiri dari lebih 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 281 juta jiwa, dimana Jawa dan Sumatera adalah dua pulau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Berbagai macam etnis yang ada di Indonesia di tiap daerah memiliki keragaman karakteristik sosial dan budaya yang unik, hal ini membentuk pola interaksi dalam masyarakat dan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keragaman ini bukan mencakup perbedaan nilai-nilai dan norma saja melainkan juga sistem sosial yang dianut oleh masing-masing kelompok etnis masyarakat. Pada tiap daerah yang memiliki budaya yang khas dapat terbentuk melalui pengaruh geografis, historis, maupun sosial serta warisan budaya yang berkembang secara turun-temurun melalui proses sosialisasi lintas generasi (Haviland dkk., 2014). Namun demikian, bentuk interdependensi sosial juga mendasari respon terhadap dinamika sosial dalam masyarakat. Dimana sebagian budaya menekankan harmoni serta penghindaran konflik, sementara budaya lain lebih ekspresif atau argumentatif dalam menjaga hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pola kehidupan budaya bersifat dinamis dan senantiasa beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berubah (Kitayama dkk., 2023).

Dalam konteks keberagaman budaya tersebut, dua kelompok masyarakat yang memiliki sistem sosial dan nilai budaya yang cukup mencolok adalah masyarakat Minang yang terletak di Sumatera Barat dan masyarakat Madura yang terletak di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS (2024), jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2024 mencapai sekitar 5,836 juta jiwa, sementara jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 41,416 juta jiwa. Di antara populasi Jawa Timur, masyarakat Madura memiliki jumlah yang signifikan, baik yang

berada di pulau Madura maupun di wilayah rantau seperti Surabaya dan sekitarnya. Salah satu perbedaan utama antara kedua suku budaya ini terletak pada nilai-nilai budaya, sistem sosial dan konsep hierarki. Masyarakat Minang menerapkan sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan kepemilikan diwariskan melalui pihak ibu (Putiah, 2007), sedangkan masyarakat Madura menganut sistem patrilineal, yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat (Effendy, 2022).

Masyarakat Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, dimana garis keturunan dan harta warisan diturunkan melalui pihak Ibu. Sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan ibu memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan adat dan ekonomi keluarga. Dalam konteks tersebut, perempuan dipandang sebagai aset berharga yang mendapatkan penghormatan tinggi, dimana nilai budaya ini turut membentuk cara pandang masyarakat Minang (Zulkifli dkk., 2023). Sistem ini cenderung mempengaruhi pada klasifikasi sosial tradisional, di mana status seseorang lebih banyak ditentukan oleh keturunan dan perannya dalam adat. Mereka yang berasal dari *urang asa* (keturunan asli pendiri nagari) cenderung memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding *urang datang* (pendatang). Selain itu, status dalam masyarakat juga dibedakan berdasarkan posisi dalam adat, seperti pemangku adat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, dibandingkan dengan penduduk biasa yang tidak memiliki peran dalam sistem adat. Dengan demikian, sistem matrilineal tidak hanya menentukan pola pewarisan, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat Minang (Kato, 2005).

Meskipun hierarki sosial Minang memiliki klasifikasi berbasis keturunan dan adat, masyarakatnya tetap menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat sebagai bentuk demokrasi lokal. Nilai ini menekankan kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial serta solidaritas komunitas. Hal ini menegaskan bahwa dinamika budaya Minang melibatkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap perubahan zaman. *“Masyarakat Minangkabau tidak begitu mementingkan klasifikasi sosial, pada zaman pengaruh hindu masih kental,*

*tidak ada perbedaan antarindividu kecuali mengenai umur” (Loeb, 2019).* Hal ini menunjukkan pengaruh perubahan zaman telah membawa perubahan pada struktur hierarki sosial dalam masyarakat Minang. Selain itu, faktor seperti kebiasaan merantau dan kemajuan pendidikan ikut berperan dalam hierarki sosial yang lebih fleksibel dan bervariasi dibandingkan dengan masa lalu.

Disisi lain, masyarakat Madura dikenal memiliki sistem sosial yang lebih patriarki dan lebih hierarkis. Masyarakat Madura dikenal dengan identitas keislaman yang kuat dan tradisi Islam yang mendalam. Sejalan dengan komunitas muslim tradisional nusantara lainnya, budaya Madura dibangun di atas nilai-nilai Islam yang menekankan ketaatan kepada orang tua, kiai, dan guru, serta penghormatan terhadap adat dan budaya lokal. Struktur kekerabatan yang khas di sini menghasilkan kepatuhan yang dalam kondisi tertentu mampu menyatukan masyarakat dan menjadi cara efektif dalam menyelesaikan konflik (Wahyudi dkk., 2015). Sehingga hal ini membuat otoritas dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam, di mana kiai menempati posisi sentral dan sangat dihormati. Kekuasaan Kiai sebagai tokoh agama terlihat jelas pada ungkapan “*Buppa’ Babbu’ Guru’ Rato*” yang mana menempatkan kiai lebih tinggi dibandingkan pemerintah (Dartiningsih, 2022).

Konsep “*Buppa’ Babbu’ Guru’ Rato*” merupakan konstruksi kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode sejarah yang relatif panjang. Konsep ini tidak hanya lahir dari dinamika sosial masyarakat, tetapi juga turut membentuk dan mengarahkan kehidupan sosial itu sendiri. Dengan kata lain, ia berperan sebagai struktur yang membentuk tatanan sosial (*structuring structure*), sekaligus sebagai struktur yang dibentuk oleh realitas sosial yang ada (*structured structure*) (Hefni, 2007). Struktur sosial di Madura juga menekankan penghormatan berdasarkan strata sosial (Dartiningsih, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa cara individu saling menghormati dan berinteraksi diatur menurut perbedaan status atau posisi sosial individu tersebut. Individu dengan status yang lebih tinggi seperti pemimpin adat atau kiai mendapatkan penghormatan yang lebih besar, sedangkan individu dengan status yang lebih rendah diharapkan dapat menunjukkan sikap hormat dan penundukan kepada yang berstatus lebih tinggi.

Sistem yang lebih hierarkis ini juga tercermin dalam adat, norma, dan cara berkomunikasi sehari-hari orang Madura yang secara tidak langsung mempertahankan dan melegitimasi struktur hierarki dalam masyarakat Madura. Terdapat sepuluh pembawaan khas masyarakat Madura yaitu keras, pemberani, tulus, melecehkan, pamer, keras kepala, tanggap, ulet, ketualangan, keberagaman (Dartiningsih, 2022). Sikap-sikap ini yang juga mendorong nilai-nilai adat Madura yang mengedepankan konsep harga diri dan kehormatan, di mana individu diharapkan mempertahankan martabatnya dan kelompoknya, bahkan dengan cara yang keras seperti *carok* dalam situasi tertentu (Dartiningsih, 2022). *Carok* merupakan suatu tradisi suku Madura yang digunakan oleh masyarakat Madura dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan masalah kehormatan dan harga diri. Dengan demikian, karakteristik budaya Madura tidak hanya membentuk pola interaksi sosial yang hierarkis, tetapi juga memperkuat nilai harga diri dan penghormatan dalam komunitas mereka.

Perbedaan nilai-nilai budaya serta sistem dan struktur sosial diantara kedua budaya ini berpotensi mempengaruhi bagaimana individu dalam masing-masing budaya memandang dominasi sosial dan ketidaksetaraan, yang diukur dari sejauh mana individu tersebut menerima atau menolak dominasi suatu kelompok tertentu atas kelompok lain. Dalam kajian psikologi sosial, orientasi individu terhadap dominasi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, tetapi juga oleh konteks budaya dan struktur sosial di mana individu tersebut berada.

Menurut Pratto dkk. (1994), *Social Dominance Orientation* (SDO) berkembang dalam masyarakat sebagai respons terhadap sistem hierarki yang ada, di mana nilai-nilai budaya dan norma sosial membentuk preferensi individu terhadap ketidaksetaraan sosial. Faktor seperti peran gender, sistem kekerabatan, serta struktur kepemimpinan dalam suatu budaya dapat memperkuat atau melemahkan SDO seseorang. Faktor-faktor ini dalam kedua budaya Minang dan Madura mempunyai gaya yang relatif berbeda, sehingga hal ini yang dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat di kedua budaya ini pun diduga berbeda.

*Social Dominance* berada pada ranah proses antar kelompok (*intergroup process*) dalam ranah psikologi sosial. Dalam *Social Dominance Theory* (SDT), Individu dengan tingkat SDO yang tinggi cenderung mendukung sistem sosial yang hierarkis dan tidak egaliter (Pratto dkk., 1994). Masyarakat yang lebih egaliter cenderung memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap kesetaraan, sementara masyarakat dengan struktur sosial yang lebih hierarkis dapat memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam menerima dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat (Ho dkk., 2015) *Social Dominance Orientation* (SDO) ini terbagi menjadi dua yaitu dominasi dan egalitarian.

Fenomena perbedaan orientasi terhadap dominasi sosial ini dapat ditemukan dalam interaksi antar kelompok etnis di Indonesia, termasuk antara masyarakat suku Madura dan suku Minang. Masyarakat Madura dikenal memiliki struktur sosial yang patriarkal dan menekankan pentingnya mempertahankan harga diri (*“ajhâ”*). Bagi orang Madura, harga diri adalah hal yang sangat penting. Mereka memiliki prinsip *“Lebbi bagus pote tollang, atembang pote mata”* yang artinya lebih baik mati (putih tulang) daripada malu (putih mata). Prinsip ini kadang menjadi pemicu tradisi carok yang kontroversial. Tradisi seperti carok yaitu duel celurit untuk membela kehormatan masih sering terjadi di masyarakat Madura. Berdasarkan berita *Tempo.com* (2024) tragedi carok di Bangkalan pada 12 Januari 2024, pertikaian ini merupakan respons terhadap pertikaian harga diri, menunjukkan nilai budaya mempertahankan status sosial dan hierarki kelompok di atas segalanya. Carok dimaknai sebagai pertarungan untuk memulihkan harga diri seseorang dan masih dipraktikkan di masyarakat Madura. Budaya ini membentuk kerangka berpikir di mana individu cenderung menerima konflik sebagai cara mempertahankan martabat keluarga atau kelompoknya yang sejalan dengan konsep SDO yang mendukung dominasi kelompok serta ketimpangan sosial dan membenarkan perilaku untuk mempertahankan posisi dan martabatnya (Ho dkk., 2015).

Budaya Minangkabau memiliki struktur sosial yang bersifat lebih egaliter dan matrilineal menempatkan unsur demokrasi tradisional musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan*) dan pemberdayaan perempuan (Putiah, 2007). Struktur sosial yang relatif seimbang ini cenderung mendukung orientasi yang lebih egaliter.

Masyarakat Minangkabau menampilkan karakteristik egaliter dan kolektif, yang terlihat nyata dalam praktik musyawarah dan pengambilan keputusan. Di Nagari Manggopoh, pemimpin adat dan pemerintahan lokal menyelenggarakan “Musyawarah Nagari” dengan gaya demokratis berbasis konsensus, melibatkan berbagai lembaga dan komunitas tanpa dominasi sepihak (Putra, 2023). Hal ini menunjukkan meskipun terdapat struktur sosial di suku Minang namun masyarakatnya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengedepankan keselarasan. Hal ini mencerminkan orientasi SDO yang menurun karena masyarakatnya cenderung menolak struktur sosial yang timpang dan dominatif.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan budaya antara suku Minang dan Madura tersebut turut membentuk orientasi terhadap dominasi sosial. Mengingat bahwa SDO berhubungan erat dengan berbagai sikap sosial seperti stereotip, prasangka, penolakan terhadap kebijakan pro-kesetaraan, serta potensi konflik antar kelompok (Sidanius & Pratto, 1999), maka membandingkan tingkat SDO antar kedua suku ini menjadi penting untuk memahami potensi dinamika sosial dan hubungan antar kelompok etnis di Indonesia. Meskipun penelitian tentang *Social Dominance Orientation* (SDO) cukup banyak dilakukan dalam berbagai konteks budaya, studi yang mengkaji SDO pada etnis Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana sistem sosial dan nilai-nilai dalam budaya yang berbeda dapat mempengaruhi tingkat SDO. Dengan memahami perbedaan SDO antara masyarakat suku Madura dan Minang, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor budaya yang berkontribusi dalam pembentukan sikap dominasi sosial. Implikasi dari pengukuran SDO ini menjadi sangat relevan dalam konteks perbedaan budaya, terutama dalam menganalisis sikap terhadap dominasi dan ketidaksetaraan sosial di masyarakat dengan nilai budaya yang berbeda.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat kecenderungan dimana sistem sosial dan nilai budaya membentuk sikap individu terhadap dominasi sosial dan ketidaksetaraan. Suku Minang yang dikenal memiliki sistem matrilineal dan nilai-nilai budaya yang lebih egaliter

dan suku Madura yang dikenal memiliki struktur sosial hierakis dan yang mengedepankan nilai kehormatan dan harga diri. Perbedaan ini diduga dapat mempengaruhi *Social Dominance Orientation* (SDO) pada kedua suku ini.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat *Social Dominance Orientation* (SDO) berdasarkan dimensi *SDO - Dominance* dan *SDO - Egalitarianism* pada suku Minang dan Madura. Sampel penelitian ini yaitu individu berusia minimal 18 tahun dengan suku Minang dan Madura yang berdomisili di daerah asal suku tersebut. Sumatera Barat untuk suku Minang dan Pulau Madura untuk suku Madura.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan tingkat *Social Dominance Orientation* (SDO) antara suku Madura dan suku Minang?
2. Apakah terdapat perbedaan dalam *SDO-Dominance* (SDO-D) dan *SDO-Egalitarianism* (SDO-E) antara kedua suku budaya ini?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Mengetahui perbedaan tingkat *Social Dominance Orientation* (SDO) berdasarkan dimensi *SDO-Dominance* (SDO-D) dan *SDO-Egalitarianism* (SDO-E) antara masyarakat suku Minang dan Madura.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang *Social Dominance Orientation* (SDO) dalam konteks budaya Indonesia, mengingat penelitian terkait cukup terbatas.
2. Mengembangkan pemahaman tentang bagaimana sistem sosial dan nilai-nilai budaya mempengaruhi penerimaan terhadap ketidaksetaraan sosial, dengan menyoroti setidaknya dua sistem sosial dan nilai-nilai budaya yang berbeda.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan wawasan berbasis data kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana sistem sosial mempengaruhi sikap terhadap dominasi sosial.
2. Membantu masyarakat dalam memahami bagaimana sistem dan nilai budaya dapat membentuk pandangan terhadap dominasi sosial dan ketidaksetaraan.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang psikologi sosial dan budaya, dan menambah peluang eksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan teori lainnya yang dapat diterapkan dalam studi *Social Dominance Orientation* (SDO) di Indonesia.